

**PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

RENCANA KERJA TAHUN 2026



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dinas Tahun 2026.

8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026.

Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun 2024;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.

- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - c. Perubahan RKPD Tahun 2026; dan
 - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 28 Agustus 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
Pada tanggal 28 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



AWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN

RENCANA KERJA TAHUN 2026



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-NYA sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, disamping itu untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan SKPD.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 2 November 2025

Kepala

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan,



SUHANDRI, SE., M.M
Pembina Tk I (IV/b) NIP.19700608 200212 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	
Daftar Isi.....	
Daftar tabel.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN TRIWULAN II TAHUN 2025.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan capaian Renstra SKPD.....	8
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.....	53
2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	58
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	59
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	59
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	61
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	61
3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja.....	62
3.3. Program dan Kegiatan.....	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	92
4.1. Rencana Kerja Tahun 2026.....	92
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah, Sumber Dana/Pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan Program/Kegiatan.....	97
BAB IV PENUTUP.....	112

DAFTAR TABEL

		<u>Hal</u>
Tabel 1.1	Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan	3
Tabel 2.1	Program Kegiatan BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	11
Tabel 2.2	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dan Pencapaian Renstra PD s/d tahun 2025 (tahun berjalan).....	19
Tabel 2.3	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	61
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.....	67
Tabel 3.1	Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan maju Tahun 2027 pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan	72
Tabel 4.1	Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Badan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah Tahun 2026.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Renja SKPD, oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Renja SKPD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Selama pelaksanaan Renja SKPD dalam tahun berjalan dilakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Renja SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas target Renstra SKPD dan RPJMD tahun bersangkutan.

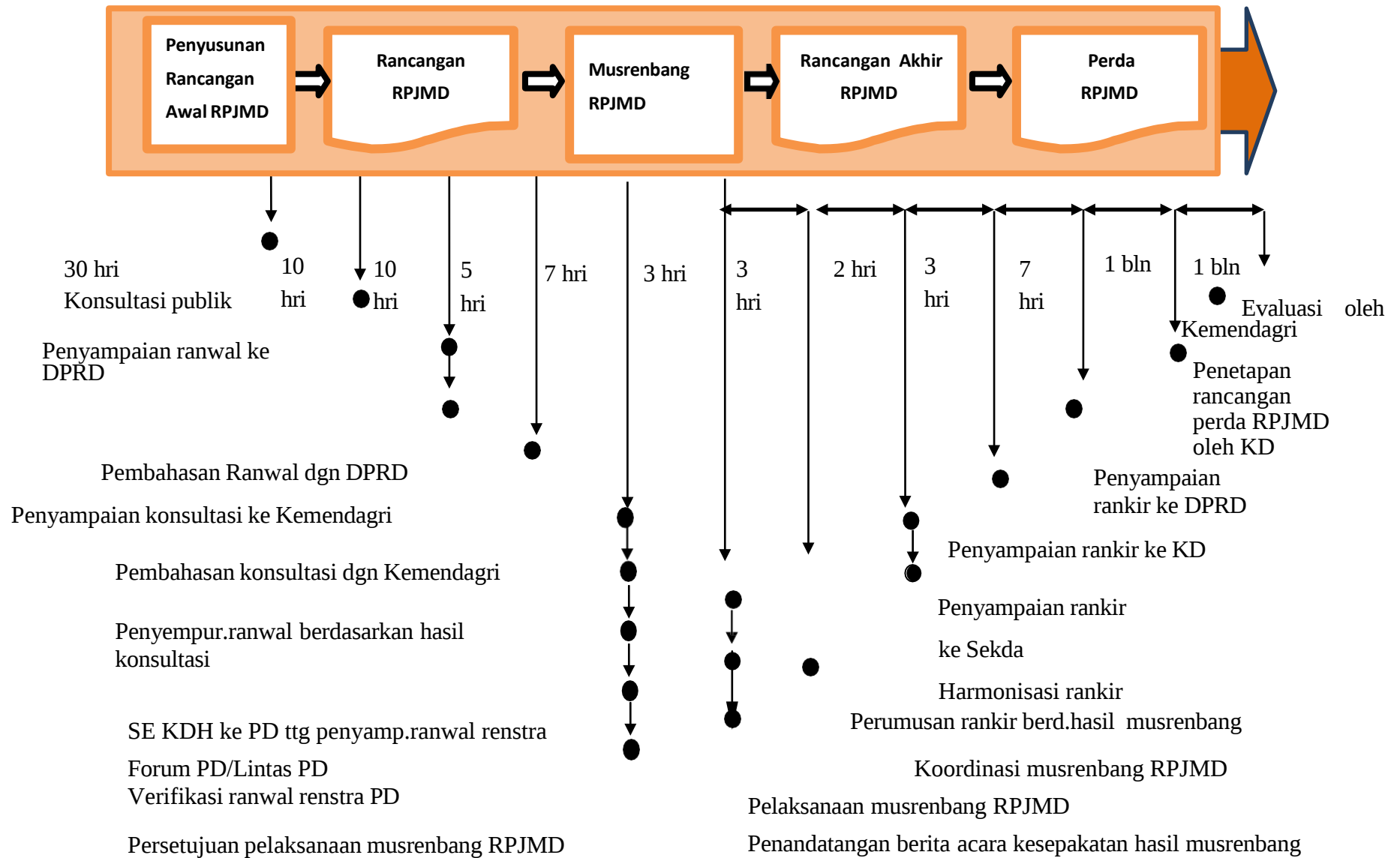
Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) dalam rencana program dan penganggaran tahunan Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi, Rencana Strategis ke dalam langkah- langkah tahunan dengan demikian Renja BPKPAD Tahun Anggaran 2025 akan lebih konkrit dan terukur.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah maka tata cara dalam penyusunan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku tata cara dan alur penyusunan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan antara lain :

1. Renja disusun berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju,
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2025 yang memuat arah kebijakan Pemerintah selama satu tahun.

Secara singkat, tahapan penyusunan RPJMD dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Tabel 1.1. Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan



1.2 Landasan Hukum

Bahwa Penyusunan Renja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, mengacu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2045
14. Rencana Strategis Dinas Pendidikan (Renstra) Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029; dan
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

- a. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- e. Menyelaraskan program dengan penganggaran;

Tujuan antara lain :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Sebagai Upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ini disusun melalui proses Rapat Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan Stakeholder internal maupun eksternal Urusan Keuangan.

Rencana Kerja ini selanjutnya dibahas lebih lanjut oleh tim yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubag dan Fungsional Tertentu dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Renja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang; Landasan Hukum Maksud dan Tujuan; Sistematika Renja.
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II TAHUN 2025, berisi tentang : Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tahun 2025 dan capaian renstra SKPD; Analisa Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi; Review terhadap rancangan awal RKPD; dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN berisi tentang : telaahan terhadap kebijakan nasional; Tujuan dan Sasaran Awal Renja; serta Program dan Kegiatan.
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 berisi tentang : Rencana Kerja Tahun 2026; Pendanaan perangkat daerah, Sumber dana/Pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program/kegiatan.
- BAB V : PENUTUP, berisi tentang : catatan penting yang perlu mendapat perhatian serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan dan hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program kegiatan. BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, selain mempunyai tugas dan fungsi SKPD koordinator juga melakukan fungsi perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset-aset lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

BPKPAD dalam hal ini juga selaku PPKD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKPAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah secara tidak langsung juga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi agenda utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk menjaga konsistensi terhadap capaian target kinerja antara perencanaan dengan pelaksanaan dan untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan perlu dilakukan review terhadap realisasi Renja PD sampai dengan triwulan II tahun 2025 yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan bila dibandingkan dengan Renstra dan prakiraan capaian kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) tahun berjalan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran terlebih dahulu perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan salah satu sarana untuk mengukur pengeluaran belanja dengan kinerja yang dihasilkan atau yang disebut dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dan terukur dalam penyusunan anggaran yang dilakukan suatu organisasi sektor publik dengan menggunakan indikator kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan dan pagu indikatif.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan triwulan II tahun 2025 dilaksanakan setelah bulan Juni. Hasil dari evaluasi menjadi acuan untuk relisasi penyerapan pada triwulan berikutnya.

Pagu belanja tahun 2025 sebesar Rp. 320.160.380.979 dan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 136.118.891.902 atau 42,52% terdiri dari :

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Adapun target kinerja pada masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu program sebesar Rp. 48.075.253.359 dan realisasi program sebesar Rp. 3.802.698.277 atau 7,91%.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pagu program sebesar Rp. 269.662.929.040 dan realisasi program sebesar Rp. 131.344.660.919 atau 48,71%.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pagu program sebesar Rp. 967.665.162 dan realisasi program sebesar Rp. 281.867.350 atau 29,13%.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pagu program sebesar Rp.1.454.533.418 dan realisasi program sebesar Rp. 689.665.356 atau 47,41%.

Secara keseluruhan, alokasi anggaran untuk Program/kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahap Pergeseran Anggaran Tahun 2025 dijelaskan rincian sebagai berikut :

1.	Belanja Operasi	= Rp.	52.965.993.450,-
2.	Belanja Modal	= Rp.	186.066.550,-
3.	Belanja Tidak Terduga	= Rp.	5.000.000.000,-
4.	Belanja Transfer	= Rp.	<u>262.008320.979,-</u>
		Rp.	320.160.380.979,-

Tabel 2.1
Program Kegiatan BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	Jumlah	Lokasi Kegiatan
5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH							320.160.380.979	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		320.160.380.979	
5	02				KEUANGAN		320.160.380.979	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		48.075.253.359	
5	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		56.972.500	
5	02	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34 Dokumen	56.972.500	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		45.681.243.306	
5	02	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	770	45.446.143.306	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	235.100.000	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kelurahan/Desa
5	02	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		36.597.282	
5	02	01	2,03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	36.597.282	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		369.913.841	

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	Jumlah	Lokasi Kegiatan
5	02	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	52.758.558	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20 Paket	54.503.633	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	34.658.900	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50 Dokumen	13.600.000	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.090.000	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000 Laporan	174.682.750	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	01	2,06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2200 Dokumen	19.620.000	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		186.066.550	
5	02	01	2,07	0005	Pengadaan mebel		0	
5	02	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19 Unit	186.066.550	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		691.752.180	

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	Jumlah	Lokasi Kegiatan
5	02	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	498.000.000	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	193.752.180	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.052.707.700	
5	02	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	41.701.700	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33 unit	206.180.000	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120 menit	158.950.000	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	645.876.000	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		269.662.929.040	
5	02	02	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1.641.400.979	
5	02	02	2,01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 dokumen	55.956.312	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	51.413.896	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	63 dokumen	33.353.920	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	Jumlah	Lokasi Kegiatan
5	02	02	2,01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	63 dokumen	34.102.857	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	63 dokumen	123.858.234	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	63 dokumen	60.126.690	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	481.500.738	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	478.607.111	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 dokumen	249.952.695	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	72.528.526	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		397.305.591	
5	02	02	2,02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	444 dokumen	62.057.264	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	658 Dokumen	55.223.698	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	Jumlah	Lokasi Kegiatan
5	02	02	2,02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	170 Orang	280.024.629	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		448.196.810	
5	02	02	2,03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	492 Dokumen	138.318.214	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	89.979.942	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	93.379.744	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen	40.889.430	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	10.953.432	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 dokumen	35.274.482	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	39.401.566	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		267.074.851.448	

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	Jumlah	Lokasi Kegiatan
5	02	02	2,04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	258.878.607.316	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	5.002.500.053	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	3.193.744.079	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	02	2,05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		101.174.212	
5	02	02	2,05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	20000 Dokumen	101.174.212	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		967.665.162	
5	02	03	2,01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		967.665.162	
5	02	03	2,01	0001	Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen	51.244.390	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	03	2,01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	34.843.440	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	03	2,01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 dokumen	37.028.732	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	03	2,01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	41 Laporan	620.159.640	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	Jumlah	Lokasi Kegiatan
								Kelurahan/Desa
5	02	03	2,01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	59.445.032	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	03	2,01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	6.449.466	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	03	2,01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	36.554.890	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	03	2,01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	41 Laporan	20.998.212	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	03	2,01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	48.790.614	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	03	2,01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang	52.150.746	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		1.454.533.418	
5	02	04	2,01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.454.533.418	
5	02	04	2,01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	9.857.680	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	Jumlah	Lokasi Kegiatan
5	02	04	2,01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	8 Dokumen	71.679.800	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	04	2,01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 laporan	37.513.500	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua
5	02	04	2,01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 unit	320.940.750	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	04	2,01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	131.674.980	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	04	2,01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5000 Objek pajak	40.744.400	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	04	2,01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	800 layanan	30.000.000	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	04	2,01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	165000 Dokumen	233.935.400	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	04	2,01	0011	Penagihan Pajak Daerah	175000 Dokumen	162.638.100	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	04	2,01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	200 Dokumen	32.088.348	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	04	2,01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	164.667.450	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja	Jumlah	Lokasi Kegiatan
5	02	04	2,01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4 Laporan	168.615.300	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
5	02	04	2,01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	50.177.710	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa

Tingkat efektifitas dan efiseinsi kinerja program kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dan Pencapaian Renstra PD s/d tahun 2025 (tahun berjalan) Tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dan Pencapaian Renstra PD s/d tahun 2025 (tahun berjalan)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH					
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02	KEUANGAN					
1	37013	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	1	1
			Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai (%)	100	50	100	100
			Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0.015	0,015	0,025	0,025
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kerja BPKPAD</i>	1	0,5	1	1
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	34 Dokumen	20 Dokumen	34 Dokumen	34 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	24 Laporan	0	24 Laporan	24 Laporan
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	34 Laporan	0	34 Laporan	34 Laporan
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	770 orang/tahun	330 orang	770 orang/tahun	770 orang/tahun
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	6 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1500 Dokumen	0	1500 Dokumen	1500 Dokumen
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	6 Dokumen	0	6 Dokumen	6 Dokumen
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan</i>	18 Laporan	0	18 Laporan	18 Laporan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	20 Dokumen	0	20 Dokumen	20 Dokumen
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-		-	-
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	12 Laporan	0	12 Laporan	12 Laporan
	5.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	12 Laporan	0	12 Laporan	12 Laporan
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	12 Laporan	0	12 Laporan	12 Laporan
	5.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	2 Unit	0	2 Unit	2 Unit
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	0	1 Paket	1 Paket
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawaaian</i>	55 Dokumen	0	55 Dokumen	55 Dokumen
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	2 Orang	0	2 Orang	2 Orang
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	55 Orang	0	55 Orang	55 Orang
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</i>	2 Orang	0	2 Orang	2 Orang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 paket	1 Paket	1 Paket
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	0	4 Paket	4 Paket
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	20 Paket	8 paket	20 Paket	20 Paket
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	6 paket	12 Paket	12 Paket

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	50 Dokumen	12	50 Dokumen	50 Dokumen
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	20 Paket	0	20 Paket	20 Paket
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	6 laporan	12 Laporan	12 Laporan
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1000 Laporan	250 laporan	1000 Laporan	1000 Laporan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	2200 Dokumen	380 Dokumen	2200 Dokumen	2200 Dokumen
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	30 Unit	0	30 Unit	30 Unit
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	19 Unit	10	19 Unit	19 Unit
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	0	2 Unit	2 Unit
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang</i>	2 Unit	0	2 Unit	2 Unit

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Disediakan</i>				
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	6 laporan	12 Laporan	12 Laporan
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	6 laporan	12 Laporan	12 Laporan
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	1 unit	1 Unit	1 Unit
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	33 Unit	20 unit	33 Unit	33 Unit
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	20 Unit	10 unit	20 Unit	20 Unit
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	120 Unit	50 unit	120 Unit	120 Unit
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1 unit	1 Unit	1 Unit
2	37378	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-		-	-
		Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	46,15	23	44,18	44,18
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	29,44	14,72	29,4	29,4
			Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (%)	12,6	6,3	12,5	12,5
			Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) (%)	70	35	71	71

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar (%)	87	43,5	87	87
			Persentase Penurunan SILPA (%)	42	21	40	40
			Persentase kepemilikan NPWP (%)	82.160	41080	89.660	89.660
			Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)	4,3	2,15	4,2	4,2
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	100	100	100
			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	7	3,5	6	6
			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	100	50	90	90
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-		-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>	2 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD					
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	63 Dokumen	41 Dokumen	63 Dokumen	63 Dokumen
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD					
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	63 Dokumen	0	63 Dokumen	63 Dokumen
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi</i>	63 Dokumen	41 Dokumen	63 Dokumen	63 Dokumen
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD					
			<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>	63 Dokumen	0	63 Dokumen	63 Dokumen
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala</i>	2 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>				
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	41 orang	100 Orang	100 Orang
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-		-	-
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	444 Dokumen	120 Dokumen	444 Dokumen	444 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>	1 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>	164 Dokumen	0	164 Dokumen	164 Dokumen
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana</i>	658 Dokumen	200 Dokumen	658 Dokumen	658 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>				
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4 Laporan	0	4 Laporan	4 Laporan
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>	4 Dokumen	0	4 Dokumen	4 Dokumen
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					
			<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>	2 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	170 Orang	82 orang	170 Orang	170 Orang
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-		-	-
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>	12 Laporan	0	12 Laporan	12 Laporan
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan</i>	492 Dokumen	250 dokumen	492 Dokumen	492 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Beban</i>				
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan pertanggungjawab-an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>	18 Laporan	9 dokumen	18 Laporan	18 Laporan
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	1 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					
			<i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	5 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>	5 Dokumen	0	5 Dokumen	5 Dokumen
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					
			<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					
			<i>Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban</i>	100 Orang	50 orang	100 Orang	100 Orang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina</i>	1 Lembaga	0	1 Lembaga	1 Lembaga
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-		-	-
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	12 Laporan	6 laporan	12 Laporan	12 Laporan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	12 Laporan	6 laporan	12 Laporan	12 Laporan
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	6 laporan	12 Laporan	12 Laporan
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-		-	-
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</i>	20000 Dokumen	10000 dokumen	20000 Dokumen	20000 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	179 Orang	0	179 Orang	179 Orang
3	37743	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
		Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset tetap (%)	6	0	5	5
			Assets Manajement (%)	100	100	100	100
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-		-	-
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga					
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					
			<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	2 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					
			<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	3 Dokumen	1 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	70 Orang	70 orang	70 Orang	70 Orang
4	38109	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-		-	-
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	10,86	5,02	11,76	11,76
			Rasio PAD (%)	9,5	5,02	9,6	9,6
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (%)	85	50	90	90
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital (%)	80	50	85	85
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-		-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</i>	8 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan</i>	1 Unit	1 unit	1 Unit	1 Unit

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Pajak Daerah</i>				
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>	5000 Laporan	0	5000 Laporan	5000 Laporan
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>	12 Laporan	6 laporan	12 Laporan	12 Laporan
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					
			<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>	5000 Obyek Pajak	2000 Objek Pajak	5000 Obyek Pajak	5000 Obyek Pajak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>	170000 Dokumen	0	170000 Dokumen	170000 Dokumen
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	800 Layanan	300 Layanan	800 Layanan	800 Layanan
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>	160000 Dokumen	87600 dokumen	160000 Dokumen	160000 Dokumen
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>	175000 Dokumen	100000 dokumen	175000 Dokumen	175000 Dokumen
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TW II TAHUN 2025	TARGET 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra s/d Tahun Berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>	50 Dokumen	25 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	4 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berfokus pada evaluasi pencapaian indikator-indikator pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029. Analisis ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam mencapai sasaran strategisnya.

A. Dasar Analisis Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, analisis kinerja pelayanan harus menitikberatkan pada perbandingan antara capaian target kinerja dengan realisasi yang telah dicapai pada periode tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk:

1. Mengukur Capaian Kinerja Seberapa jauh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah telah berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Renstra.
2. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat Menganalisis elemen-elemen yang memengaruhi tercapainya atau tidak tercapainya target kinerja.
3. Merumuskan Rekomendasi Perbaikan Memberikan masukan strategis untuk meningkatkan kinerja pelayanan di masa mendatang.

B. Indikator Kinerja Pelayanan Utama

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mencakup beberapa indikator utama yang merepresentasikan tujuan dan sasaran Renstra, antara lain:

1. Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah, Nilai Kematangan Inovasi Daerah, Indeks Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah dan Indeks Kemandirian Fiskal
2. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber daya Manusia yang handal dan paham dalam urusan keuangan

Tabel 2.3.
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030	
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	5.02 - KEUANGAN									
A	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	1	1	1	1	1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
		Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
		Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0,015	0,022	0,021	0,020	0,020	0,015	0,015	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
B	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	40,65	46,15	44,18	30	30	30	30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030	
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	34,16	29,44	29,40	40	40	40	40	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
		Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (%)	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) (%)	69	70	71	72	72	73	73	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Meningkatnya tata kelola pembendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar (%)	86,86	87	87	89	91	92	94	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
		Persentase Penurunan SILPA (%)	44	42	40	38	35	35	35	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
		Persentase kepemilikan NPWP (%)	77.264	82.160	89.660	97.160	104.660	112.160	119.660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)	4,4	4,3	4,2	4,1	4	4	4	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030	
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	7,7	7	6	6	5	5	4	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	118	100	90	80	70	60	50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
C	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset tetap (%)	6,52	6	5	6,52	6,52	6,52	6,52	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
		Assets Manajemen (%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
D	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	9,50	10,86	11,76	12,74	13,69	14,73	15,60	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030	
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		Rasio PAD (%)	9,5	9,5	9,6	9,6	9,65	9,65	9,7	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (%)	80	85	90	95	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital (%)	75	80	85	90	95	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	TOTAL KESELURUHAN									

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPAD selaku SKPD maupun SKPKD.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dibidang tata kelola pemerintahan pada Rancangan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030, pemetaan masalah berdasarkan tugas dan fungsi beserta faktor penghambat dan pendorong, maka isu strategis BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan pada Renstra periode 2021-2026 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapainya sesuai pernyataan visi. Dengan memperhatikan permasalahan yang diangkat pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan antara lain: Kinerja keuangan, meskipun opini BPK terhadap Laporan Keuangan menunjukkan hasil yang baik (WTP), terdapat masalah dalam pengelolaan SILPA yang cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa ada dana yang tidak terpakai secara optimal. Selain itu, proporsi belanja modal yang rendah dibandingkan dengan belanja operasi dapat menghambat infrastruktur yang diperlukan.

Maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan menentukan Isu Strategis yang paling tepat, yakni: Kurangnya komitmen beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses penyusunan APBD, Pelaporan keuangan agar tepat waktu dan sesuai aturan dalam setiap tahapannya sehingga memiliki indikator dan maksimal dalam pencapaian target, dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian di bidang Keuangan Pendapatan dan aset daerah.

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik secara kuantitatif maupun kualitatif guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan pendapatan dan aset

daerah;

3. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal;
5. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset;
6. Integrasi sistem antar pengelolaan keuangan dengan pengelolaan aset (barang milik daerah) merupakan suatu yang menjadi sangat urgen dalam mendukung terciptanya optimalisasi pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah.
7. Peningkatan implementasi dalam pengembangan maupun penyempurnaan SOP terkait pelayanan BPKPAD kepada masyarakat /publik maupun perangkat daerah lainnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan alat bantu berupa aplikasi perencanaan berbasis web dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Alur proses dimulai dari mengentri rancangan awal renja diaplikasi perencanaan yang selanjutnya otomatis tersalin ke dalam rancangan awal RKPD, begitu pula dengan tahapan rancangan akhir. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselarasan antara RKPD dan Renja.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perangkat Daerah melakukan proses penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk tahun 2026 BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki usulan program/kegiatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada BPKPAD
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<i>NIHIL</i>					

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelayanan program pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, masing-masing Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintah yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan Pembangunan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja BPKPAD

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi, Misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu - isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Terkait dengan uraian diatas, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan rencana strategis 5 (lima) tahun, untuk berkesinambungan suatu perencanaan maka disusun renja PD tahun 2026 yang bertujuan ***“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”***.

B. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun yang berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mensinkronkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran dan kemampuan anggaran. Memperhatikan hal tersebut maka ditetapkan sasaran organisasi, yaitu ***“Meningkatnya Kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah”, “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” dan***

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah”

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan antara lain,

- a. Memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Memusatkan tujuan/arah perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang;
- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
- d. Meningkatkan komunikasi dan integrasi data dalam pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembayaran sesuai sumber pendanaan (DAU, DAK).
- f. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui penambahan sumber-sumber pendapatan baru seperti pengembangan sektor ekonomi baru yang potensial, pencarian sumber pendapatan alternatif, pengembangan usaha daerah dan mengembangkan kerjasama dengan pihak lain.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah. Program Kerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini

BPKPAD mempunyai tugas antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda, dan melaksanakan fungsi BUD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan utamanya dibidang pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Tabel 3.1. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			329.853.965.739,84		341.823.900.000,00
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			329.853.965.739,84		341.823.900.000,00
	5.02	KEUANGAN			329.853.965.739,84		341.823.900.000,00
1,	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			45.733.943.374,00		47.889.700.000,00
		[Meningkatnya Tata Kelola Organisasi]	Jumlah Inovasi	1		1	
			Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah	0.021		0.021	
			Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai	100		100	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	57.600.000,00	100%	66.000.000,00
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	34 Dokumen	57.000.000,00	34 Dokumen	60.000.000,00
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SKPD				
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Dokumen RKA –SKPD</i>	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	24 Laporan	100.000,00	24 Laporan	1.000.000,00
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	34 Laporan	100.000,00	34 Laporan	1.000.000,00
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	43.276.043.374,00	-	45.275.200.000,00
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	56 Orang/bulan	43.040.343.374,00	56 Orang/bulan	45.000.000.000,00
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	235.100.000,00	12 Dokumen	270.000.000,00
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1500 Dokumen	100.000,00	1500 Dokumen	1.000.000,00
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	12 Dokumen	100.000,00	12 Dokumen	200.000,00
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	100.000,00	1 Laporan	1.000.000,00
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	6 Dokumen	100.000,00	6 Dokumen	1.000.000,00
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	18 Laporan	100.000,00	18 Laporan	1.000.000,00
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	20 Dokumen	100.000,00	20 Dokumen	1.000.000,00
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	36.600.000,00	-	43.000.000,00
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	4 Dokumen	36.000.000,00	4 Dokumen	37.000.000,00
	5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	12 Laporan	100.000,00	12 Laporan	1.000.000,00
	5.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan</i>	1 Laporan	100.000,00	1 Laporan	1.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	12 Laporan	100.000,00	12 Laporan	1.000.000,00
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	12 Laporan	100.000,00	12 Laporan	1.000.000,00
	5.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	35.500.000,00	-	45.000.000,00
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	2 Unit	100.000,00	2 Unit	1.000.000,00
		[Meningkatkan Tata Kelola Organisasi]	Jumlah Inovasi Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai	1 0.021 100		1 0.021 100	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	100.000,00	1 Paket	1.000.000,00
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	55 Dokumen	100.000,00	55 Dokumen	1.000.000,00
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	7 Orang	35.000.000,00	7 Orang	40.000.000,00
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	56 Orang	100.000,00	56 Orang	1.000.000,00
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	2 Orang	100.000,00	2 Orang	1.000.000,00
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	365.800.000,00	-	453.500.000,00
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	125 Paket	50.000.000,00	125 Paket	55.000.000,00
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	100.000,00	1 Paket	500.000,00
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	20 Paket	45.000.000,00	20 Paket	47.000.000,00
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	35.000.000,00	12 Paket	37.000.000,00
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	50 Dokumen	13.600.000,00	50 Dokumen	16.000.000,00
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	20 Paket	100.000,00	20 Paket	1.000.000,00
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	12.000.000,00
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	300 Laporan	200.000.000,00	300 Laporan	270.000.000,00
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	2200 Dokumen	12.000.000,00	2200 Dokumen	15.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	245.500.000,00	-	257.000.000,00
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	100.000,00	1 Unit	1.000.000,00
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	100.000,00	1 Unit	1.000.000,00
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	85.000.000,00	4 Unit	87.000.000,00
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	160.000.000,00	18 Unit	165.000.000,00
		-					
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000,00	1 Unit	1.000.000,00
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000,00	1 Unit	1.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	100.000,00	1 Unit	1.000.000,00
		[Meningkatnya Tata Kelola Organisasi]	Jumlah Inovasi Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai	1 0.021 100		1 0.021 100	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	692.000.000,00	-	710.000.000,00
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	498.000.000,00	12 Laporan	500.000.000,00
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	194.000.000,00	12 Laporan	210.000.000,00
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.024.900.000,00	-	1.040.000.000,00
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan</i>	1 Unit	42.000.000,00	1 Unit	45.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>dibayarkan Pajaknya</i>				
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	29 Unit	207.000.000,00	29 Unit	208.000.000,00
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	10 Unit	10.000.000,00	10 Unit	15.000.000,00
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	100 Unit	120.000.000,00	100 Unit	122.000.000,00
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	645.900.000,00	2 Unit	650.000.000,00
2,	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			281.509.722.365,84		291.159.000.000,00
		[Meningkatnya tata kelola anggaran]	1.Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 2.Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD 3.Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan 4.Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	40 30 12,4 72		40 30 12,4 72	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
			(dikurangi transfer expenditures)				
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	1.575.354.000,00	-	1.642.000.000,00
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	56.000.000,00	2 Dokumen	65.000.000,00
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	52.000.000,00	2 Dokumen	55.000.000,00
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD					
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	63 Dokumen	33.354.000,00	63 Dokumen	35.000.000,00
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD					
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	63 Dokumen	35.000.000,00	63 Dokumen	40.000.000,00
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	63 Dokumen	125.000.000,00	63 Dokumen	130.000.000,00
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	63 Dokumen	61.000.000,00	63 Dokumen	65.000.000,00
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	2 Dokumen	485.000.000,00	2 Dokumen	500.000.000,00
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	2 Dokumen	480.000.000,00	2 Dokumen	500.000.000,00
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	2 Dokumen	175.000.000,00	2 Dokumen	177.000.000,00
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	41 Orang	73.000.000,00	41 Orang	75.000.000,00
		[Meningkatnya tata kelola perbendaharaan]	1. Persentase kepemilikan NPWP 2. Persentase Penurunan SILPA 3. Persentase Realisasi Anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar 4. Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam	89,660 40 87 4,2		89,660 40 87 4,2	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
			APBD tahun sebelumnya				
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	406.100.000,00	-	436.000.000,00
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	444 Dokumen	65.000.000,00	444 Dokumen	70.000.000,00
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	100.000,00	1 Laporan	1.000.000,00
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	164 Dokumen	100.000,00	164 Dokumen	1.000.000,00
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	658 Dokumen	55.500.000,00	658 Dokumen	60.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)					
			<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</i>	4 Laporan	100.000,00	4 Laporan	1.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>	4 Dokumen	100.000,00	4 Dokumen	1.000.000,00
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					
			<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>	2 Dokumen	100.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	134 Orang	285.000.000,00	134 Orang	300.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
		[Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan]	1.Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 3. Opini BPK Atas Laporan Keuangan 4. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	6 90 Wajar Tanpa Pengecualian 100		6 90 Wajar Tanpa Pengecualian 100	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	460.500.000,00	-	515.000.000,00
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	100.000,00	12 Laporan	1.000.000,00
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban					
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	540 Dokumen	140.000.000,00	540 Dokumen	150.000.000,00
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>	18 Laporan	100.000,00	18 Laporan	1.000.000,00
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	1 Laporan	90.000.000,00	1 Laporan	95.000.000,00
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	95.000.000,00	2 Dokumen	105.000.000,00
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	5 Dokumen	41.000.000,00	5 Dokumen	45.000.000,00
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>	5 Dokumen	100.000,00	5 Dokumen	1.000.000,00
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	1 Dokumen	12.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					
			<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>	1 Dokumen	36.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					
			<i>Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	41 Orang	45.000.000,00	41 Orang	55.000.000,00
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina</i>	1 Lembaga	100.000,00	1 Lembaga	1.000.000,00
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	100.000,00	1 Laporan	1.000.000,00
		[Meningkatnya tata kelola perbendaharaan]	1. Persentase kepemilikan NPWP 2. Persentase Penurunan SILPA 3. Persentase Realisasi Anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar 4. Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	89,660 40 87 4,2		89,660 40 87 4,2	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	278.922.668.365,84	-	288.415.000.000,00
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran</i>	12 Laporan	270.726.424.286,84	12 Laporan	280.000.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Bantuan Keuangan</i>				
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	12 Laporan	5.002.500.000,00	12 Laporan	5.005.000.000,00
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	3.193.744.079,00	12 Laporan	3.410.000.000,00
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-		145.100.000,00		151.000.000,00
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</i>	17240 Dokumen	145.000.000,00	17240 Dokumen	150.000.000,00
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	179 Orang	100.000,00	179 Orang	1.000.000,00
3,	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1.044.200.000,00		1.105.200.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
		[Meningkatnya tata kelola aset daerah]	1.Assets Manajement 2. Persentase Penambahan Nilai Aset tetap	100 5		100 5	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	1.044.200.000,00	-	1.105.200.000,00
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga					
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	60.000.000,00	2 Dokumen	65.000.000,00
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	100.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	41 Dokumen	40.000.000,00	41 Dokumen	45.000.000,00
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	2 Dokumen	55.000.000,00
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah					
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	41 Laporan	621.000.000,00	41 Laporan	630.000.000,00
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah					
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	100.000,00	1 Laporan	200.000,00
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah					
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	60.000.000,00	1 Laporan	62.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	52.000.000,00
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	6 Dokumen	37.000.000,00	6 Dokumen	38.000.000,00
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	41 Laporan	21.000.000,00	41 Laporan	25.000.000,00
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	52.000.000,00
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
		Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	70 Orang	55.000.000,00	70 Orang	60.000.000,00
4,	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1.566.100.000,00		1.670.000.000,00
		[Meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaporan]	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	90		90	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	1.566.100.000,00	-	1.670.000.000,00
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	2 Dokumen	28.000.000,00	2 Dokumen	40.000.000,00
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</i>	8 Dokumen	72.000.000,00	8 Dokumen	80.000.000,00
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	4 Laporan	50.000.000,00	4 Laporan	80.000.000,00
		[Meningkatkan penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital]	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	85		85	
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
		Daerah					
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	1 Unit	250.000.000,00	1 Unit	255.000.000,00
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 2. Rasio PAD	11.76 9.6		11.76 9.6	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>	5000 Laporan	100.000,00	5000 Laporan	1.000.000,00
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>	100 Laporan	105.000.000,00	100 Laporan	110.000.000,00
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					
			<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>	167000 Obyek Pajak	41.000.000,00	167000 Obyek Pajak	45.000.000,00
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>	-	200.000.000,00	-	205.000.000,00
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	30 Layanan	35.000.000,00	30 Layanan	45.000.000,00
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
		Pelaporan Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>	5000 Dokumen	65.000.000,00	5000 Dokumen	70.000.000,00
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>	175000 Dokumen	165.000.000,00	175000 Dokumen	167.000.000,00
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>	200 Dokumen	35.000.000,00	200 Dokumen	40.000.000,00
		[Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan]	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	90		90	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	4 Dokumen	300.000.000,00	4 Dokumen	305.000.000,00
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	4 Laporan	170.000.000,00	4 Laporan	175.000.000,00
		[Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital]	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	85		85	
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>	4 Laporan	50.000.000,00	4 Laporan	52.000.000,00
	J U M L A H				329.853.965.739,84		341.823.900.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Tahun 2026

Rencana Kerja (RENJA) lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 merupakan penjabaran kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk indikasi program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025. Hal ini tidak lain dalam rangka menyelesaikan isu dan permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan tugas pokok dan fungsi kelembagaan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset serta barang daerah sebagai operasionalisasi pencapaian visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) BPKPAD selanjutnya. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2026 sudah disesuaikan dengan target dan capaian Renstra dan RPJMD.

Pada tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai :

1. Program sebanyak 4, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

2. Kegiatan sebanyak 15, yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan, Peanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- i. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran daerah

- j. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- k. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- l. Penunjang Urusan Kewenangan pengelolaan Keuangan Daerah
- m. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan Daerah
- n. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- o. Pengelolaan Pendapatan Daerah

3. Sub Kegiatan sebanyak 116, yaitu :

- 1. Penyusunan dokumen Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah
- 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
- 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 9. Penyediaan Administrasi dan Pelaksaaan tugas ASN
- 10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 13. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD
- 15. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 16. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 17. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 18. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- 19. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 20. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 21. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 22. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

23. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
24. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
25. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
26. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
27. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
28. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
29. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
31. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
32. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
33. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
34. Penyediaan Bahan/Material
35. Fasilitasi Kunjungan Tamu
36. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
37. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
38. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
39. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
40. Pengadaan Mebel
41. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
42. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
43. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
44. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
45. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
46. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
47. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
48. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
49. Pemeliharaan Mebel
50. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
51. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
52. Koordinasi, Penyusunan KUA dan PPAS

53. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
54. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD
55. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA – SKPD
56. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA SKPD
57. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA SKPD
58. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
59. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
60. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan bidang anggaran
61. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
62. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
63. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
64. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
65. Koordinasi,fasilitasi,asistensi,sinkroniasi,supervisi,monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya
66. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
67. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
68. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
69. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
70. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
71. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
72. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
73. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

74. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
75. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota
76. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
77. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
78. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
79. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
80. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
81. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
82. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
83. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
84. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
85. Pengelolaan dana darurat dan mendesak
86. pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota
87. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
88. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
89. Penyusunan Standar Harga
90. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
91. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
92. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
93. Penatausahaan Barang Milik Daerah
94. investarisasi barang milik daerah

95. Pengamanan Barang Milik Daerah
96. Penilaian Barang Milik Daerah
97. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
98. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah
99. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah
100. Penyusunan laporan barang milik daerah
101. Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kab/kota
102. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
103. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
104. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
105. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
106. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
107. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
108. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
109. Penetapan Wajib Pajak Daerah
110. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
111. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
112. Penagihan Pajak Daerah
113. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
114. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
115. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
116. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah, Sumber Dana / Pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan Program/Kegiatan

Untuk Menjalankan Program /Kegiatan tentunya diperlukan pendanaan perangkat daerah. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tahun 2026, secara rinci dijabarkan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel IV. I

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			329.853.965.739,84
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			329.853.965.739,84
	5.02	KEUANGAN			329.853.965.739,84
1,	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			45.733.943.374,00
		[Meningkatnya Tata Kelola Organisasi]	Jumlah Inovasi	1	
			Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah	0.020	
			Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai	100	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	57.600.000,00
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah</i>	34 Dokumen	57.000.000,00
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>	1 Dokumen	100.000,00
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Dokumen RKA -SKPD</i>	1 Dokumen	100.000,00
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD			
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD</i>	1 Dokumen	100.000,00
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	100.000,00
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	24 Laporan	100.000,00
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN
2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	34 Laporan	100.000,00
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	43.276.043.374,00
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	56 Orang/bulan	43.040.343.374,00
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	235.100.000,00
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1500 Dokumen	100.000,00
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	12 Dokumen	100.000,00
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	100.000,00
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	6 Dokumen	100.000,00
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	18 Laporan	100.000,00
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	20 Dokumen	100.000,00
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	36.600.000,00
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	100.000,00
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	4 Dokumen	36.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	12 Laporan	100.000,00
	5.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	100.000,00
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	12 Laporan	100.000,00
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	12 Laporan	100.000,00
	5.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	100.000,00
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	35.500.000,00
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	2 Unit	100.000,00
		[Meningkatnya Tata Kelola Organisasi]	Jumlah Inovasi Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai	1 0.020 100	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	100.000,00
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	55 Dokumen	100.000,00
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	7 Orang	35.000.000,00
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	56 Orang	100.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	2 Orang	100.000,00
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	365.800.000,00
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	125 Paket	50.000.000,00
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	100.000,00
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	20 Paket	45.000.000,00
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	35.000.000,00
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	50 Dokumen	13.600.000,00
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	20 Paket	100.000,00
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	10.000.000,00
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	300 Laporan	200.000.000,00
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	2200 Dokumen	12.000.000,00
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	245.500.000,00
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	1 Unit	100.000,00
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	100.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	4 Unit	85.000.000,00
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	18 Unit	160.000.000,00
		-			
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	100.000,00
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	100.000,00
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	100.000,00
		[Meningkatkan Tata Kelola Organisasi]	Jumlah Inovasi Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai	1 0.020 100	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	692.000.000,00
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	498.000.000,00
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	194.000.000,00
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.024.900.000,00
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	42.000.000,00
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	29 Unit	207.000.000,00
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	10 Unit	10.000.000,00
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	100 Unit	120.000.000,00
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	645.900.000,00
2,	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			281.509.722.365,84
		[Meningkatnya tata kelola anggaran]	1.Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 2.Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD 3.Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan 4.Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	43 30 12 71	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	1.575.354.000,00
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>	2 Dokumen	56.000.000,00
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	2 Dokumen	52.000.000,00
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	63 Dokumen	33.354.000,00
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	63 Dokumen	35.000.000,00
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			
			<i>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi</i>	63 Dokumen	125.000.000,00
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			
			<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>	63 Dokumen	61.000.000,00
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	2 Dokumen	485.000.000,00
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	2 Dokumen	480.000.000,00
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	2 Dokumen	175.000.000,00
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	41 Orang	73.000.000,00
		[Meningkatkan tata kelola perbendaharaan]	1. Persentase kepemilikan NPWP 2. Persentase Penurunan SILPA 3. Persentase Realisasi Anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar 4. Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	16,825 40 87 4,2	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	406.100.000,00
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	444 Dokumen	65.000.000,00
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>	1 Laporan	100.000,00
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>	164 Dokumen	100.000,00
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	658 Dokumen	55.500.000,00
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>	1 Dokumen	100.000,00
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
			<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>	4 Laporan	100.000,00
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>	4 Dokumen	100.000,00
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			
			<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>	2 Dokumen	100.000,00
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	134 Orang	285.000.000,00
		[Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan]	1.Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 3. Opini BPK Atas Laporan Keuangan 4. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	6 90 Wajar Tanpa Pengecualian 100	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	460.500.000,00
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	100.000,00
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	540 Dokumen	140.000.000,00
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	100.000,00
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	90.000.000,00
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	95.000.000,00
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen	41.000.000,00
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>	5 Dokumen	100.000,00
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	1 Dokumen	12.000.000,00
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			
			<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>	1 Dokumen	36.000.000,00
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			
			<i>Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	1 Dokumen	1.000.000,00
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	41 Orang	45.000.000,00
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			
			<i>Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina</i>	1 Lembaga	100.000,00
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			
			<i>Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	100.000,00
		[Meningkatkan tata kelola perbendaharaan]	1. Persentase kepemilikan NPWP 2. Persentase Penurunan SILPA 3. Persentase Realisasi Anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar 4. Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	16,825 40 87 4,2	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	278.922.668.365,84
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	12 Laporan	270.726.424.286,84
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	12 Laporan	5.002.500.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	3.193.744.079,00
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-		145.100.000,00
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</i>	17240 Dokumen	145.000.000,00
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	179 Orang	100.000,00
3,	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1.044.200.000,00
		[Meningkatnya tata kelola aset daerah]	1.Assets Manajement 2. Persentase Penambahan Nilai Aset tetap	100 5	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	1.044.200.000,00
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga			
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>	2 Dokumen	60.000.000,00
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			
			<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	2 Dokumen	100.000,00
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	41 Dokumen	40.000.000,00
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			
			<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	2 Dokumen	40.000.000,00
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>	41 Laporan	621.000.000,00
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	100.000,00
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	60.000.000,00
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	50.000.000,00
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	10.000.000,00
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	6 Dokumen	37.000.000,00
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	41 Laporan	21.000.000,00
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			
			<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>	1 Laporan	50.000.000,00
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	70 Orang	55.000.000,00
4,	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1.566.100.000,00
		[Meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaporan]	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	90	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	1.566.100.000,00
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	2 Dokumen	28.000.000,00
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</i>	8 Dokumen	72.000.000,00
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	4 Laporan	50.000.000,00
		[Meningkatkan penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital]	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	85	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	1 Unit	250.000.000,00
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 2. Rasio PAD	11.76 9.6	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>	5000 Laporan	100.000,00
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>	100 Laporan	105.000.000,00
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
			<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>	167000 Obyek Pajak	41.000.000,00
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah			
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>	-	200.000.000,00
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
			<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	30 Layanan	35.000.000,00
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			
			<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>	5000 Dokumen	65.000.000,00
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>	175000 Dokumen	165.000.000,00
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>	200 Dokumen	35.000.000,00
		[Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan]	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	90	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	4 Dokumen	300.000.000,00
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	4 Laporan	170.000.000,00
		[Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital]	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	85	

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN
2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			
			<i>Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>	4 Laporan	50.000.000,00
	J U M L A H				329.853.965.739,84

BAB IV PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan, disusun berdasarkan Rencana Strategis BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu Renja-SKPD BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan,



SUHANDRI, SE., M.Si
NIP. 19700608 200212 1 003